



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 30 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
UNIT KERJA : DINAS PERHUBUNGAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : GEDE GUNAWAN ADNYANA PUTRA
2. Jabatan : KEPALA DINAS
3. NHK : 85259

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN Rp. 4.215.000.000

1. Tanah Seluas 745 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI
Rp. 1.180.000.000
2. Tanah Seluas 140 m2 di KAB / KOTA BULELENG, HASIL SENDIRI
Rp. 210.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 275 m2/245 m2 di KAB / KOTA
BULELENG, WARISAN Rp. 950.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/54 m2 di KAB / KOTA
BULELENG, WARISAN Rp. 525.000.000
5. Tanah Seluas 400 m2 di KAB / KOTA BULELENG, WARISAN Rp.
600.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 104 m2/36 m2 di KAB / KOTA
GIANYAR, HASIL SENDIRI Rp. 750.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 114.000.000

1. MOTOR, YAMAHA V-IXION SEPEDA MOTOR Tahun 2011, HASIL
SENDIRI Rp. 7.000.000
2. MOTOR, HONDA SEPEDA MOTOR Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 7.000.000
3. MOBIL, TOYOTA AGYA 1.2 G M/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI
Rp. 100.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 135.900.000

D. SURAT BERHARGA Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 102.588.726



F. HARTA LAINNYA

Rp. ----

Sub Total

Rp. 4.567.488.726

III. HUTANG

Rp. 194.193.087

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)

Rp. 4.373.295.639

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.